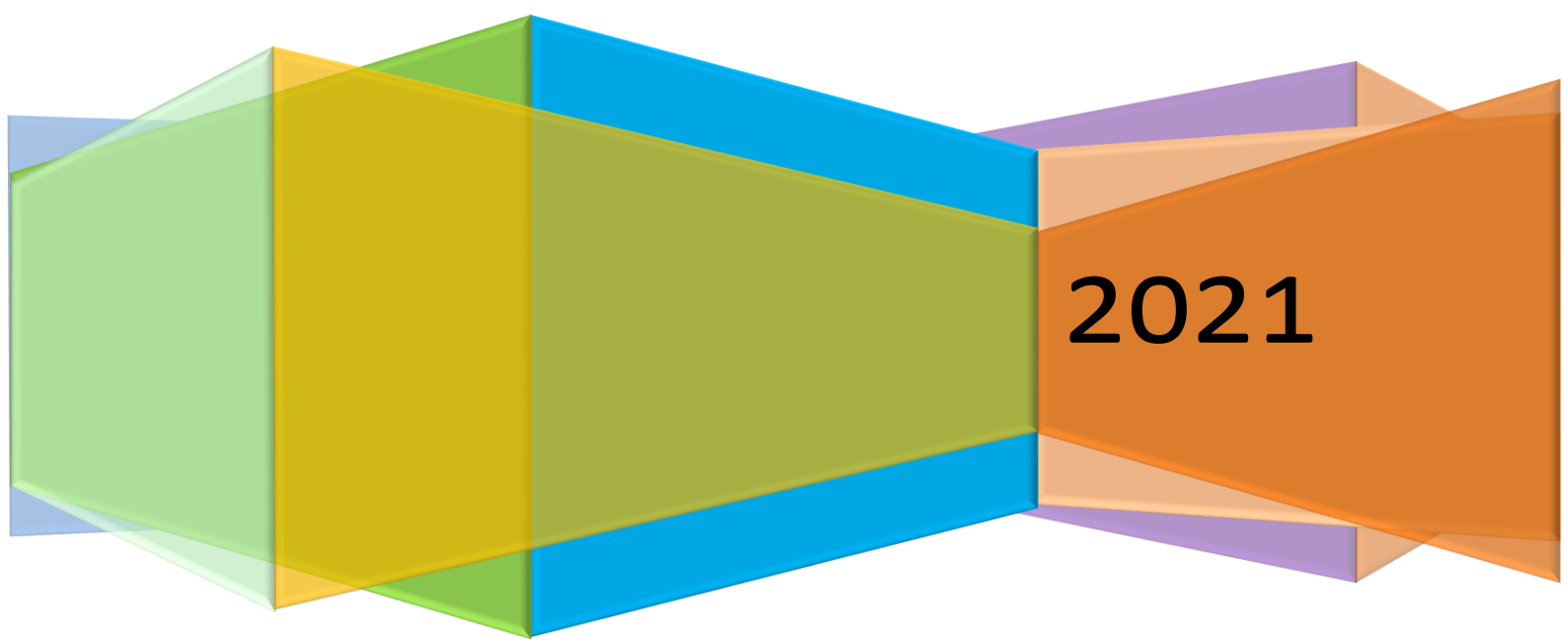


RENCANA KERJA TAHUNAN (R K T)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DISPERMADES PPKB)
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2021**



2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahuwataala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran program-program serta arahan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2022. Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2021. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Akhirnya dengan segala keterbatasan ini kami berharap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini bisa rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Banjarnegara, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara,



Drs. AGUS KUSUMA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600816 199003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 tahun 2019 Tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menjawab isu-isu strategis yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi Bupati sebagai berikut :

1. Misi Ke 2 (dua), : **“Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan berdasarkan konsep tata kelola yang baik”**, dengan tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa didukung strategi kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa;
2. Misi Ke 5 (lima), : **“Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar”**, dengan tujuan Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas dan sasaran Meningkatkan kualitas dan di dukung Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai landasan dan pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	v
.....	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Keterkaitan Renstra dengan RKT	7
BAB II. RENCANA KERJA TAHUNAN	9
A. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
B. Target Program, Kegiatan dan Anggaran Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara.....	10
BAB III. PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 9

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2021 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 106);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
28. Peraturan Darah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);

29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

b. Susunan Organisasi Dispermades PPKB

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;
 - 2) Seksi Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa; dan
 - 3) Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- e. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa; dan
 - 2) Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi; dan
 - 2) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- g. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;dan

- 2) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Dispermades PPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dispermades PPKB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dispermades PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dispermades PPKB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang

perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KETERKAITAN RKT DENGAN RENSTRA

Renstra Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Visi Misi Kabupaten Banjarnegara sebagai bahan acuan pembuatan program-program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Visi - Misi Kabupaten Banjarnegara 2017-2022 adalah sebagai berikut :

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Misi:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis.
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, memuat perencanaan tahunan yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan diraih untuk tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2019-2022.

BAB II
RENCANA KERJA TAHUNAN

A. Tujuan dan Sasaran Strategis

Bedasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 adalah ssebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indokator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase perkembangan desa maju	9 %
2	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total	2.30%

**B. Target Program, Kegiatan dan anggaran DISPERMADES PPKB
Kab. Banjarnegara**

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) sehingga apabila tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Tahun 2021 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp150.000.000,00
Outputs	:	Terlaksana pembayaran telepon, speedy, air dan listrik
Target	:	12 bulan
Outcomes	:	Persentase terlayannya administrasi perkantoran
Target	:	100 %

b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp65.000.000,00
Outputs	:	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi
Target	:	12 bulan
Outcomes	:	Persentase terlayannya administrasi perkantoran
Target	:	100 %

c. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp30.000.000,00
Outputs	:	Alat kebersihan dan pembersih kantor yang terpenuhi
Target	:	12 bulan
Outcomes	:	Persentase terlayannya administrasi perkantoran
Target	:	100 %

d. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp500.000.000,00
Outputs	:	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi
Target	:	12 bulan
Outcomes	:	Persentase terlayannya administrasi perkantoran

- Target : 100 %
- e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
 - Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp550.000.000,00
 - Outputs : Jumlah jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi
 - Target : 12 bulan
 - Outcomes : Persentase terlayannya administrasi perkantoran
 - Target : 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp200.000.000,00
 - Outputs : Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi
 - Target : 12 bulan
 - Outcomes : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
 - Target : 100%
- b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp100.000.000,00
 - Outputs : Jumlah gedung kantor yang dipelihara
 - Target : 12 bulan
 - Outcomes : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
 - Target : 100%
- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp200.000.000,00
 - Outputs : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
 - Target : 12 bulan
 - Outcomes : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi
 - Target : 100%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pembekalan Aparatur Pemerintah Desa
 - Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp195.000.000,00
 - Outputs : Jumlah anggota BPD yang dilatih, Jumlah perangkat desa baru yang dilatih, Jumlah Kepala Desa baru yang dilatih
 - Target : 266 anggota BPD, 100 perangkat desa

- baru.
- Outcomes : Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD
- Target : 85%
- b. Kegiatan Bintek Pilkades
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp50.000.000,00
- Outputs : Jumlah panitia pelaksana pilkades yang dilatih
- Target : 68 panlak
- Outcomes : Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD
- Target : 85%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp45.000.000,00
- Outputs : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Target : 8 dokumen
- Outcomes : Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan
- Target : 100%

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a. Kegiatan Asistensi perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp70.000.000,00
- Outputs : Jumlah desa yang didampingi dalam proses perencanaan pembangunan
- Target : 100 desa
- Outcomes : Persentase peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang perencanaan pembangunan desa
- Target : 85%
- b. Kegiatan Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa (Ketahanan Masyarakat)
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp60.000.000,00
- Outputs : Jumlah desa yang didampingi dan dimonitoring dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi (ketahanan masyarakat)
- Target : 266 desa
- Outcomes : Persentase peningkatan pemahaman

- masyarakat desa tentang perencanaan pembangunan desa
- Target : 85%
- c. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp250.000.000,00
- Outputs : Jumlah pengurus LP3M yang didampingi
- Target : 1182 orang pengurus LP3M
- Outcomes : Persentase peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang perencanaan pembangunan desa
- Target : 85%

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- a. Kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp100.000.000,00
- Outputs : Jumlah desa yang dilatih/didampingi manajemen BUMDes
- Target : 51 desa
- Outcomes : Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial
- Target : 65%

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a. Kegiatan Pendampingan TNI Manunggal Membangun Desa
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp280.000.000,00
- Outputs : Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD
- Target : Swadaya masyarakat
Rp625.000.000,00
- Outcomes : Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
- Target : 28%
- b. Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp75.000.000,00
- Outputs : Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan BBGRM
- Target : Swadaya masyarakat
Rp22.000.000,00
- Outcomes : Persentase tingkat swadaya

- | | | | | |
|--------|---|------------------|-------|----------|
| | | masyarakat | dalam | kegiatan |
| | | pembangunan desa | | |
| Target | : | 28% | | |
- c. Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan
- | | | | | |
|----------|---|------------------------------|---------|----------|
| Inputs | : | APBD Kab. TA 2021 | | |
| | | Rp85.000.000,00 | | |
| Outputs | : | Terpilihnya desa berprestasi | | |
| Target | : | 3 desa berprestasi | | |
| Outcomes | : | Persentase | tingkat | swadaya |
| | | masyarakat | dalam | kegiatan |
| | | pembangunan desa | | |
| Target | : | 28% | | |
- d. Kegiatan pembinaan pengelolaan sanitasi penyedia air minum berbasis masyarakat
- | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|---------|----------|
| Inputs | : | APBD Kab. TA 2021 | | |
| | | Rp120.000.000,00 | | |
| Outputs | : | Jumlah BP-SPAM yang didampingi | | |
| Target | : | 120 BP-SPAM | | |
| Outcomes | : | Persentase | tingkat | swadaya |
| | | masyarakat | dalam | kegiatan |
| | | pembangunan desa | | |
| Target | : | 28% | | |
- e. Kegiatan pengelolaan pendampingan pasca PNPM Mandiri Pedesaan
- | | | | | |
|----------|---|--|---------|----------|
| Inputs | : | APBD Kab. TA 2021 | | |
| | | Rp95.000.000,00 | | |
| Outputs | : | Jumlah UPK PNPM-MP yang terpantau pengelolaannya | | |
| Target | : | 20 UPK Kecamatan | | |
| Outcomes | : | Persentase | tingkat | swadaya |
| | | masyarakat | dalam | kegiatan |
| | | pembangunan desa | | |
| Target | : | 28% | | |
- f. Pendampingan Bantuan Keuangan Kabupaten
- | | | | | |
|----------|---|---|---------|----------|
| Inputs | : | APBD Kab. TA 2021 | | |
| | | Rp25.000.000,00 | | |
| Outputs | : | Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan kabupaten (BPJS) | | |
| Target | : | 266 desa | | |
| Outcomes | : | Persentase | tingkat | swadaya |
| | | masyarakat | dalam | kegiatan |
| | | pembangunan desa | | |
| Target | : | 28% | | |

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp350.000.000,00
Outputs	:	Jumlah desa yang dilatih tata ruang perdesaan
Target	:	180 Orang
Outcomes	:	Persentase peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah
Target	:	90%

b. Kegiatan Asistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp300.000.000,00
Outputs	:	Jumlah desa yang didampingi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)
Target	:	266 Desa
Outcomes	:	Persentase peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah
Target	:	90%

9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

a. Kegiatan peningkatan ketrampilan manajemen keluarga

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp350.000.000,00
Outputs	:	Jumlah TP PKK (kecamatan, desa dan kelurahan) yang dibina
Target	:	56 TP PKK
Outcomes	:	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan
Target	:	28%

10. Program Keluarga Berencana

a. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp50.000.000,00
Outputs	:	Jumlah KK miskin yang terlayani KB
Target	:	800 KK
Outcomes	:	Angka kelahiran total (TFR)
Target	:	2,30%

b. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp50.000.000,00
Outputs	:	Jumlah PUS tidak ber KB
Target	:	50.403 Orang
Outcomes	:	Angka kelahiran total (TFR)
Target	:	2,30%

c. Kegiatan DAK Bidang KB

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp2.000.000.000,00
Outputs	:	- Jumlah sarana pelayanan Kb - Jumlah pembangunan / pengembangan / alih fungsi balai penyuluh KB - Jumlah pembangunan / pengembangan / alih fungsi gudang alkon - Jumlah pengadaan mobil unit penerangan keluarga berencana - Jumlah pengadaan sarana KIE kit dan media lini lapangan
Target	:	- Jumlah sarana kerja lapangan KB - 1 paket sarana dan prasarana pelayanan KB - 1 paket pembangunan / pengembangan balai penyuluhan KB tingkat kecamatan - 1 paket pengadaan sarana pendataan - 1 paket pengadaan sarana KIE kit dan Medis lini lapangan - 1 paket pengadaan sarana petugas lapangan KB
Outcomes	:	Angka kelahiran total (TFR)
Target	:	2,30%

d. Kegiatan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp15.000.000,00
Outputs	:	Jumlah usulan dokumen penetapan angka kredit yang terfasilitasi
Target	:	70 dokumen usulan penetapan angka kredit
Outcomes	:	Persentase informasi KKBPK
Target	:	100%

e. Kegiatan Operasional Keluarga Berencana

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp5.578.890.000,00
Outputs	:	Terlaksananya kegiatan operasional keluarga berencana
Target	:	- Jumlah balai penyuluh KB yang mendapat bantuan operasional KB - Jumlah KKB yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi - Jumlah kampung KB yang melaksanakan integrasi program KKBPK dan pembangunan lainnya - Jumlah kampung KB yang mendapat bantuan operasional KB
		Jumlah penyediaan dan/atau

- pengadaan dan/atau perbanyak media cetak dan fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik
- Dukungan manajemen
- Outcomes : Angka kelahiran total (TFR)
- Target : 2,30%
- f. Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan
- Inputs : APBD Kab. TA 2020
Rp50.000.000,00
- Outputs : Jumlah profil kependudukan dan KB
- Target : - 1 Dokumen profil kependudukan
- 12 Laporan bulanan (feedback)
- Outcomes : Persentase pemetaan pengendalian penduduk dan KB
- Target : 100%

11. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- a. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp300.000.000,00
- Outputs : - Jumlah PUS usia 15 sampai 19 tahun
- Jumlah penyuluhan reproduksi remaja usia 15 sampai dengan 19 tahun
- Target : - 6.797 orang PUS usia 15 s/d 19 tahun
- 10 Kegiatan penyuluhan reproduksi remaja usia 14 s/d 19 tahun
- Outcomes : Persentase PUS yang menikah usia 15 sampai 19 tahun
- Target : 2,97%

12. Program Pelayanan Kontrasepsi

- a. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
- Inputs : APBD Kab. TA 2020
Rp750.000.000,00
- Outputs : - Jumlah peserta KB IUD yang difasilitasi
- Jumlah Peserta KB Implant yang difasilitasi
- Jumlah Peserta KB Suntik yang difasilitasi
- Jumlah Peserta KB Pil yang difasilitasi
- Jumlah Peserta KB MOW yang difasilitasi
- Jumlah peserta KB MOP yang difasilitasi

		- Jumlah Peserta KB Kondom yang difasilitasi
		- Jumlah peserta KB Pasca persalinan dan keguguran yang difasilitasi
Target	:	- 17.586 peserta KB IUD
		- 17.755 peserta KB Implant
		- 34.694 peserta KB Suntik
		- 15.400 peserta KB Pil
		- 9.864 Peserta KB MOW
		- 1.818 Peserta KB MOP
		- 2.255 Peserta KB Kondom
		- 10.018 Peserta KB pasca persalinan dan keguguran
		- 187.460 Peserta KB
Outcomes	:	Persentase penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan peserta KB aktif
Target	:	100%

13. Program Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

a. Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp100.000.000,00
Outputs	:	- Jumlah IMP yang aktif di Desa/Kelurahan - Jumlah IMP dan pengelola terbaik Jumlah IMP mandiri di desa
Target	:	- 7.134 orang IMP - 3 Kategori IMP terbaik - 2.150 IMP Mandiri
Outcomes	:	Persentase IMP Mandiri di Desa/Kelurahan
Target	:	30,14%

14. Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

a. Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar sekolah

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp250.000.000,00
Outputs	:	- Jumlah PIK Remaja yang difasilitasi - Jumlah pendidik sebaya yang difasilitasi Jumlah konselor sebaya yang difasilitasi Jumlah anggota saka kencana
Target	:	- 66 Kelompok PIK

		- 146 Orang pendidik sebaya
		- 76 konselor sebaya
		- 40 anggota saka kencana
Outcomes	:	Persentase PIK Remaja Tegar
Target	:	23,3%

15. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

a. Kegiatan revitalisasi posyandu

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp130.000.000,00
Outputs	:	Jumlah posyandu pratama dan madya yang dievaluasi
Target	:	581 posyandu
Outcomes	:	Meningkatnya strata posyandu purnama
Target	:	40%

16. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

a. Fasilitasi Penunjang Pilkades

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp800.000.000,00
Outputs	:	Jumlah Kepala Desa baru yang dilantik
Target	:	11 kepala desa
Outcomes	:	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri
Target	:	80%

b. Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp40.000.000,00
Outputs	:	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan tanah kas desa
Target	:	5 Desa
Outcomes	:	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri
Target	:	80%

c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa

Inputs	:	APBD Kab. TA 2021 Rp300.000.000,00
Outputs	:	Jumlah desa yang sosialisasi dan dibina administrasi keuangan desa
Target	:	266 Desa
Outcomes	:	Persentase kemampuan perangkat

- desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri
- Target : 80%
- d. Pendampingan Dana Desa
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp150.000.000,00
- Outputs : Jumlah desa yang didampingi pengelolaan dana desa
- Target : 100 desa
- Outcomes : Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri
- Target : 80%
- e. Pendamping Bantuan Keuangan Infrastruktur
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp60.000.000,00
- Outputs : Jumlah desa yang didampingi bantuan keuangan provinsi (infrastruktur)
- Target : 80 desa
- Outcomes : Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri
- Target : 80%

17. Program Pengembangan Data/Informasi

- a. Kegiatan Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp85.000.000,00
- Outputs : Jumlah karya peserta yang memenuhi kriteria TTG
- Target : 9 karya TTG
- Outcomes : Persentase tersedianya dokumentasi kreativitas dan inovasi
- Target : 55%

18. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan
- Inputs : APBD Kab. TA 2021
Rp135.000.000,00
- Outputs : Jumlah dokumen kawasan pedesaan yang tersusun
- Target : 4 dokumen
- Outcomes : Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
- Target : 4 dokumen

RENCANA KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

Bedasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 adalah ssebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintah desa	Persentase perkembangan desa maju	9%
2.	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30%

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah disusun untuk masa 4 (empat) tahun 2019 - 2022. RKT Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun keempat dari perencanaan jangka menengah.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara terukur, terarah, efektif dan efisien sesuai apa yang ditargetkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021.

Banjarnegara, 31 Januari 2020

KEPALA DISPERMADESPPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA,



Drs. AGUS KUSUMA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600816 199003 1 005